

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa, masyarakat Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang terdiri dari beragam budaya.

Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang berada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari 254.000.000 jiwa yang tersebar di pulau-pulau di seluruh Indonesia¹.

Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa tetapi juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan.²

Keanekaragaman budaya merupakan bagian dari demokrasi, dimana segala kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Demokrasi merupakan sistem dan tatanan yang dipandang mampu menampung segala aspirasi yang berkembang didalam kehidupan masyarakat, sehingga

¹ Badan Pusat Statistik Tahun 2015, *Indonesia Dalam Angka*. BPS RI.Jakarta, 2015.

² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* Sekretariat Jendral MPR RI Jakarta, 2013 (Hal : 194-197)

demokrasi harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu demokrasi sangatlah penting, tidak hanya sekedar untuk dijalankan dalam roda pemerintah namun juga perlu diterapkan oleh segenap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Adapun arti penting kehidupan demokrasi dalam kehidupan masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan rasa kasih sayang di antara sesama warga masyarakat.
2. Terjalinnnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat sebab semua kehendak / keinginan anggota masyarakat dapat disalurkan.
3. Terhindarnya tindakan kekerasan di antara masyarakat karena semua permasalahan diselesaikan secara damai.
4. Memberi motivasi kepada seluruh warga masyarakat untuk bekerja lebih giat karena semua masyarakat merasa senang dan puas serta merasa lebih dihargai kedudukannya di masyarakat.
5. Dapat meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat, sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga masyarakat puas, tidak ada yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap warga masyarakat lainnya.
6. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan sehingga tumbuh semangatdalam melaksanakan pembangunan.³

Tradisi demokrasi yang berbasiskan musyawarah / mufakat dalam masyarakat dan suku bangsa di Indonesia merupakan contoh konkret implementasi demokrasi Indonesia. Hal tersebut menggambarkan ajaran Bung Karno mengenai sistem demokrasi Indonesia seperti yang termaktub dalam ajaran Marhaenisme dan Pancasila 1 Juni 1945 dimana demokrasi sejatinya lahir dari budaya politik masyarakat Indonesia selama berabad-abad, jauh sebelum munculnya pengaruh budaya dan ideologi asing di negeri ini.⁴

Masyarakat Manggarai merupakan masyarakat komunal sehingga setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh orang Manggarai harus sesuai dengan norma dan adat-istiadatnya.

³ *Gea, Wulandari dan Babari (2003). Relasi Dengan Sesama. Jakarta PT Gramedia (hal: 107).*

⁴ *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara . Sekretariat Jendral MPR RI Jakarta, 2013 (Hal : 199-201)*

Jika ditinjau lebih jauh dalam konteks pemerintahan Indonesia, benih-benih demokrasi sesungguhnya sudah ada dan sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat Manggarai jauh sebelum sistem pemerintahan ini dipilih menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Dengan kata lain, karakter demokrasi sudah dihayati oleh orang-orang Manggarai sebelum sistem demokrasi tiba di Manggarai. Sistem demokrasi yang ada di Manggarai dikenal dengan sebutan *lonto leok*.

Lonto leok artinya duduk bersama dalam bentuk lingkaran untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah. Masalah yang dimaksud dapat berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan budaya. *Lonto leok* merupakan tradisi dalam masyarakat Manggarai sejak zaman kerajaan dan terus dilestarikan sampai sekarang. *Lonto leok* dijadikan sebagai media para raja atau *dalu* (camat) untuk mengkomunikasikan kebijakan dan keputusan tertentu secara bersama-sama dengan seluruh masyarakat.

Biasanya, dalam membuka suatu *lonto leok*, diawali dengan sapaan adat dari tuan rumah atau yang mengundang untuk menyampaikan maksud serta tujuan diadakannya suatu *lonto leok* melalui upacara *Kepok*. *Kepok* adalah ungkapan adat yang disampaikan pada upacara penerimaan tamu. *Kepok* merupakan bentuk ungkapan kebahagiaan dalam penerimaan (tamu) dari tuan rumah atau tuan tanah (*beo*) yang disampaikan melalui pribahasa adat (*goet*). Tamu-tamu tersebut adalah orang yang dianggap penting dan terpandang dalam kaitannya dengan status dan peran sosialnya di dalam masyarakat.

Setelah upacara *kepok* dijalankan, tuan rumah atau yang mengundang langsung memulai diskusi atau memberikan kesempatan kepada orang yang dianggap mampu dan berwibawa seperti kepala kampung (*tua gendang*) untuk memimpin diskusi. Seorang pemimpin *lonto leok* maupun peserta, harus memenuhi unsur tata krama dalam berbicara dan bersikap. Hal ini tercermin dalam pribahasa *tipek mu'u agu madis ba weki* yang bermakna tertib berbahasa dan

berperilaku santun sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Inilah yang membedakan duduk berkumpul dalam konteks *lonto leok* dengan duduk berkumpul biasa (untuk sekadar membahas guyon, candaan, dan saat bertamu / *lejong*) dalam adat Manggarai serta pembeda antara budaya duduk berkumpul di daerah lain.

Lonto leok merupakan karakter dasar orang Manggarai (*perang'e data Manggarai*) sekaligus sebagai sebuah tradisi dalam masyarakat adat Manggarai yang telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang dan masih digunakan sampai saat ini. Sebagai warisan budaya, *lonto leok* sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Manggarai dalam menjalankan peradabannya baik di ranah sosial, politik, pendidikan, agama dan di dalam berbagai ritual serta upacara adat.

Lonto leok dalam bingkai yang lebih luas tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah upacara adat. Frans Salesman⁵ dalam analisisnya memperlihatkan ritual dan upacara orang Manggarai dari jenis waktu pelaksanaannya, yakni: 1) ritual yang berkaitan dengan proses kehidupan awal manusia, yaitu: kehamilan, masa nifas dan menopause; 2) ritual yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan interaksi sosial, yaitu: mata pencaharian, penyakit, perkawinan, syukuran dan selamatan, sumbangan sosial; dan 3) ritual yang berkaitan dengan transisi antara kehidupan dunia dan akhirat, yaitu kematian.

Selain tiga poin yang disampaikan Frans Salesman, sebenarnya orang Manggarai punya relasi yang intens dengan “dunia seberang” melalui ritus-ritus khusus. Munculnya ritual *teing hang* dalam upacara *penti*, misalnya, merupakan salah satu bukti keberlanjutan relasi antara manusia, leluhur, pencipta dan alam semesta. Berkaitan dengan pembagian ritual adat ini, *Lonto leok* sering terjadi pada ritual yang berkaitan kelangsungan hidup dan interaksi sosial orang Manggarai. Namun tidak menutup kemungkinan pada fase kelahiran dan kematian juga biasa

⁵ Frans Salesman dalam Regus, Max *Menyapa Manggarai*. Jakarta: Parrhesia. 2011.

diadakan *lonto leok* misalnya dalam persiapan ritual *delap* (penyambutan bayi) dan persiapan menyambut ritual *kelas* (pemutus hubungan antara yang hidup dan yang mati).

Kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan hidup dalam kehidupan orang Manggarai ini menjadikan *lonto leok* sebagai budaya yang tidak bisa dilepaskan. Dalam interaksi sosial, praktek *lonto leok* biasa digunakan sesuai dengan konteks dan tujuannya seperti dalam persiapan upacara maupun saat upacara adat berlangsung, penyelesaian masalah sosial-kemasyarakatan dan juga dalam bidang politik dan pemerintahan.

Dewasa ini muncul suatu fenomena baru dalam ranah demokrasi modern, ketika *lonto leok* tidak hanya dipakai sebagai konsolidasi adat dalam menyelesaikan masalah sosial, tetapi juga sebagai media konsolidasi politik di era demokrasi modern. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Para calon bupati, calon legislatif bahkan calon kepala Desa sering kali menggunakan *lonto leok* sebagai sarana dan strategi komunikasi politik untuk memperoleh dukungan dan suara dari masyarakat sebagai pemilih yang merupakan media transaksi gagasan untuk mencapai kesamaan makna. Sedangkan hakekat budaya *lonto leok* sesungguhnya adalah simbol persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat umum secara bersama, atau masalah perorangan yang tak bisa diselesaikannya sendiri namun membutuhkan kehadiran serta campur tangan dari klen atau sukunya dalam suatu wilayah.

Bergesernya peran budaya *lonto leok* ketika pihak luar datang meminta dukungan untuk memilihnya dalam proses politik. Pergeseran itu terjadi bila beberapa kandidat datang dengan tujuan yang sama yakni meminta dukungan pada suku atau klen yang sama dalam masyarakat. Dengan menimbulkan berbagai macam persepsi yang timbul diantara pribadi pribadi dalam klen tersebut hingga melahirkan sikap individual yang berakibat retaknya hubungan sosial dalam klen atau suku tersebut.

Adapun bentuk-bentuk politisasi *lonto leok* lain yang dilakukan oleh para kandidat calon bupati dalam proses pilkada dengan cara mendatangi kepala adat suatu wilayah yang menjadi target konsolidasi, seperti menyampaikan sejumlah janji, dan program kerja yang di jalankan yang bersentuhan langsung dengan masalah masyarakat setempat/gendang pongkal jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati.

Lebih lanjut, hal diatas dapat diketahui dari fenomena pemilihan kepala daerah di kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015, dimana paket calon kepala daerah beserta tim sukses Gusti-Maria mendatangi *mbaru gendang pongkal* dalam rangka melakukan pendekatan kepada tu'a gendang. Dari proses yang dilakukan oleh para calon kepala daerah Gusti-Maria, tentu penghormatan melalui simbol adat berupa *kepok* menjadi yang utama dilakukan. Hal tersebut dimaksud agar mereka dapat diterima dan mendapat tempat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga *Mbaru Gendang Pongkal*. Setelah paket calon kepala daerah Gusti-Maria telah diterima dalam keluarga *mbaru gendang Pongkal*, ada pendekatan lebih lanjut lainnya yang dilakukan oleh paket Gusti-Maria yaitu meminta kesediaan tua adat agar menjadi tim sukses dan menyerahkan kartu/stiker calon bupati kepada tua adat untuk dibagikan kepada masyarakat.

Dalam forum *lonto leok* juga terjadi interaksi yang cukup dalam antara calon bupati, tua adat, dan masyarakat yang dilakukan melalui ungkapan adat dan simbol adat yang dilakukan melalui cara persuasi. Simbol adat yang dimaksud dan yang dipakai oleh bakal calon seperti tuak kepok, seng rongko (uang rokok bagi masyarakat yang hadir dalam forum *lonto leok*) *wa'e Lu'u* (uang duka bagi keluarga yang sudah meninggal dunia di kampung tersebut). Langkah tersebut yang dilakukan oleh para calon bupati kepada tokoh adat dan masyarakat sebagai bentuk permintaan dukungan dari calon bupati tersebut dalam persaingan menuju pemilihan bupati yang diikutinya tersebut.

Calon bupati menggunakan ungkapan kiasan ini agar dapat merebut simpati dari masyarakat, serta memposisikan diri sebagai bagian dari keluarga yang merupakan bahasa persuasif yang dilakukan oleh Paket Gusti-Maria agar masyarakat dalam forum *lonto leok* memiliki kedekatan emosional. Pendekatan persuasif yang dipakai aktor politik untuk mengkomunikasikan kepentingannya melalui kekuatan unsur-unsur budaya (Bahasa adat,) sehingga terciptanya proses transaksi gagasan dan perasaan untuk memperoleh kesamaan makna, adalah Pendekatan Masyarakat (Hati dan Gagasan) dalam *Lonto leok*. Masyarakat yang hadir dalam forum *lonto leok* adalah kumpulan individu yang memiliki gagasan dan emosional (hati). Ruang hati dan gagasan ini adalah unsur penting yang harus direbut calon bupati.

Dari uraian politisasi dalam budaya *lonto leok* dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa *lonto leok* adalah seni persuasif (pendekatan, cara, metode) yang dipakai seorang aktor politik untuk mengkomunikasikan kepentingannya melalui kekuatan unsur-unsur budaya (masyarakat, dan bahasa adat) tanpa memandang makna dan nilai-nilai budaya *lonto leok* yang sesungguhnya. Dalam ruang transaksi itu ada ritual adat *kepok* sebagai penghargaan terhadap sesama dan *lu'u* sebagai penghargaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu lompatan dalam tradisi *lonto leok* dimana tradisi ini dimanfaatkan sebagai sarana atau alat komunikasi politik oleh para calon yang akan bersaing dalam pesta demokrasi atau perhelatan demokrasi di Manggarai Barat. *Lonto leok* akhirnya menjadi salah satu “senjata” yang digunakan oleh para calon Kepala Daerah untuk mengkomunikasikan program kerjanya. *Lonto leok* menjadi sarana kampanye politik untuk meraup suara dari para pemilih dengan mengkomunikasikan program kerja para calon Kepala Daerah tersebut.

Pada titik ini *lonto leok* sebagai sebuah tradisi luhur yang lahir dari kearifan lokal masyarakat Manggarai sesungguhnya sudah mengalami perubahan dalam tatanan politik karena digunakan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan. Sedangkan *lonto leok* sendiri sesungguhnya merupakan sarana untuk menyatukan berbagai pendapat yang berbeda dari berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Dari penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa masalah yang terjadi adalah adanya lompatan kultural dalam *lonto leok* dengan kepentingan para calon kepala daerah, dimana para calon kepala daerah menggunakan *lonto leok* sebagai alat untuk menjual visi dan misi serta mendulang suara dari masyarakat.

Melihat fenomena *lonto leok* sebagai sarana musyawarah mufakat yang mengalami degradasi nilai yang digunakan dalam konsolidasi para calon bupati dan wakil bupati di Manggarai Barat, maka penulis mencoba menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai degradasi budaya *lonto leok* sebagai bentuk konsolidasi para calon bupati dan wakil bupati dengan judul *POLITISASI BUDAYA LONTO LEOK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015* (Studi kasus budaya *Lonto Leok* dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal di Gendang Pongkal Desa Wontong Kecamatan Macang Pacar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk politisasi *Lonto Leok* Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan bentuk politisasi *lonto leok* pada pemilihan Kepala Daerah kabupaten Manggarai Barat tahun 2015.

2.Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjadi bahan masukan bagi para penyelenggara pemerintahan daerah di Manggarai Barat agar dapat melestarikan budaya *lonto leok*.
2. Sebagai bahan masukan bagi calon peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut tentang budaya *lonto leok*.